PERUBAHAN RENCANA KERJA (P.RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TOBA

TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 441 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

BUPATI TOBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bahwa penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Toba Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Diktum ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Inspektorat;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Kesehatan;
13. Dinas Pertanian;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
17. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
27. Kecamatan Ajibata;
28. Kecamatan Bonatua Lunasi;

Dipindai dengan CamScanner

29. Kecamatan Borbor;
30. Kecamatan Habinsaran;
31. Kecamatan Laguboti;
32. Kecamatan Lumban Julu;
33. Kecamatan Parmaksian;
34. Kecamatan Porsea;
35. Kecamatan Siantar Narumonda;
36. Kecamatan Silaen;
37. Kecamatan Tampahan;
38. Kecamatan Uluan;
39. Kecamatan Nassau;
40. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
41. Kecamatan Sigumpar

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Tahapan Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk memastikan telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 09 Juli 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB.TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kepala Bagian Hukum

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP 19750804 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba;
2. Inspektur Kabupaten Toba;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
INSPEKTORAT
Jln. Huta Bulu – Mejan, Balige, Sumatera Utara 22312
Telp. (0632) 21393, Faksimile (0632) 21393
Laman www.tobakab.go.id, Pos-el Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian@tobakab.go.id

CATATAN HASIL REVIU
ATAS
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (P RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025

Uraian Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir P Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Toba Nomor 700/218/IRDA/ST/2024 tanggal 16 Juli 2025 untuk melaksanakan reviu Perubahan Renja PD Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

Kesimpulan:
1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir P Renja PD
a. Dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu rancangan akhir P Renja PD telah lengkap.
2. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir P Renja PD dangan Rancangan Akhir P RKPD
a. Nama program, kegiatan, pagu dana dan indikator pada rancangan akhir P Renja PD telah sesuai dengan nama program, kegiatan, pendanaan dan indikator pada P RKPD.
Catatan reviu:
--
Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui
--
Rekomendasi :
Mempertahankan keselarasan nama program, kegiatan, pagu dana dan indikator pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan P RKPD Kabupaten Toba Tahun 2025

Balige, 24 Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba	Plt. Inspektur KabupatenToba
Melati Silalahi, SE, M.Si	**Bobby N. Batubara, SE, M.Si, Ak, CGCAE**
Pembina Tk. I	**Pembina Tk. I**
NIP. 19740313 199402 2 002	**NIP. 19740405 200604 1 004**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan PD selama satu tahun berkenaan dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahun berkenaan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025.

Namun disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Perubahan RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga peningkatan kualitas rencana berkelanjutan. Dan kepada semua pihak yang membantu penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-NYA kepada kita semua.

Plt. KEPALA DINAS PMDP DAN PA
KABUPATEN TOBA,

MELATI SIHALAHI, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19740313 199402 2 002

DAFTAR ISI

		Hal
HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN**	**8**
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**	**15**
BAB IV	**PENUTUP**	**22**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba merupakan SKPD yang menyelenggarakan Urusan wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi Kabupaten Toba yaitu **"Toba Mantap 2029"** maju daerahnya, sejahtera rakyatnya dan berkelanjutan pembangunannya, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi Daerah dan Mendukung Kemandirian Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba sebagai salah satu unsur pembantu penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Toba di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) dengan mengacu kepada rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Toba dan berpedoman kepada dokumen perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan ini dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Perubahan RKPD Kabupaten Toba, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba, evaluasi pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba.

Dengan proses yang sistematis dan substansi materi yang lengkap, Perubahan Renja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan Perubahan RKPD Kabupaten Toba dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja

Provinsi, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);

31. Peraturan Bupati Toba Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Bupati Toba Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 21);
33. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2023;
34. Peraturan Bupati Toba Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan arahan, landasan yang kuat dan jelas dan sebagai alat kendali dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba adalah untuk menciptakan Sinkronisasi, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan daerah secara tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba untuk Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penyusunan perubahan renja, landasan hukum penyusunan perubahan renja, maksud dan tujuan penyusunan perubahan renja dan sistematika penulisan dokumen perubahan renja.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran, disertai dengan aturan-aturan pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

a. Hasil Evaluasi IKU, IKS dan Indikator Program sampai Triwulan I

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan di dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi 38 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 6 (enam) urusan pemerintahan absolut, 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pemerintahan pilihan.

Perubahan renja didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah (kalau sudah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan DPA PD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berkenaan sejak tahun pertama periode Renstra Perangkat Daerah, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra PD.

b. Evaluasi IKU

1. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun dengan target 91,00 persen realisasi sampai dengan triwulan I 0 persen. Realisasi Indeks Desa Membangun diperoleh dari jumlah desa berkembang tahun 2025. indeks desa membangun 2025 belum ada data yang falit jadi belum bisa mengetahui

jumlah desa berkembang untuk tahun 2025 karna dari dari Kementerian belum ada.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu:

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari dimensi Modal Sosial (Indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial); dimensi kesehatan (Indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); dimensi pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Fungsi Indeks Desa Membangun :

Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengukur status perkembangan suatu desa, sehingga rekomendasi kebijakan yang diperlukan akan lebih tepat sasaran.

Selain itu, berikut ini adalah fungsi lain dari indeks desa membangun, yaitu :

1. Digunakan sebagai indikator penting untuk memperkuat pencapaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan
2. Digunakan sebagai acuan untuk melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan sehingga terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri akan lebih mudah untuk dicapai dan lebih tepat sasaran.

Tujuan IDM

1. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa;
2. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5 (lima) status Desa : Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, Desa Sangat Tertinggal.

2. Persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi

Persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi dengan target 90,00 persen realisasi sampai dengan triwulan I 0,19 persen. Realisasi persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi diperoleh dari Jumlah desa yang melaksanakan tertib adminsitrasi. Pemerintah desa merupakan penyelenggara pelayanan publik terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat selaku penerima layanan. Dikarenakan peran strategis pemerintah desa tersebut sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut memberikan keleluasaan bagi desa untuk menjalankan *local self government* atau kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangganya sendiri yang biasa disebut otonomi desa. Dengan begitu, segala kewenangan dan tanggung jawab wajib dilakukan pemerintah desa meliputi kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan sampai dengan pemberdayaan masyarakat desa. Itu artinya, peran pemerintah desa sangat penting bagi masyarakat. Sehingga apabila pelaksanaan pemerintahan desa berjalan dengan baik, maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya pun dapat terwujud.

Administrasi desa adalah proses kegiatan pencatatan data dan informasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang dicatat dalam buku administrasi desa. Kemudian, berdasarkan aturan dijelaskan melalui Pasal 1 Permendagri 47/2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, bahwa administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Dengan kata lain, kegiatan

kecil yang dapat dilakukan agar administrasi desa dapat terwujud adalah dengan tertib administrasi desa.

3. Persentase Peningkatan Status Desa

Persentase Peningkatan Status Desa dengan target 86,00 Persen realisasi sampai dengan triwulan I 0 Persen. Realisasi persentase peningkatan status Desa diperoleh dari Jumlah Desa Tertinggal yang menuju kriteria desa berkembang berdasarkan IDM pertahun/Jumlah Desa Berkembang.

4. Persentase LKD dan LAD Aktif

Persentase LKD dan LAD Aktif dengan target 70,00 persen realisasi 10,00 persen. Realisasi Persentase LKD dan LAD Aktif diperoleh dari Jumlah LKD dan LAD Aktif / Jumlah seluruh lembaga. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya (LAD) dalam ketentuan umum Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Sebagaimana Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain atau BPD dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya (LAD) adapun jenis lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan adalah :

- Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- Karang Taruna (KARTAR)
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM/LKMD)
- Lembaga Adat Desa
- Posyandu

5. Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak

Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan target 65,00 persen realisasi 34,32 persen. Realisasi Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak diperoleh dari **Rumus : Rasio KDRT**

$$\frac{\text{Jumlah Kasus KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Rumus : Persentase Perempuan di lembaga pemerintah

$$\frac{\text{Jumlah perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah perempuan toba}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil evaluasi atas Peraturan Bupati Toba Nomor 74 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Toba dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan guna memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil dan berdampak langsung kepada Masyarakat serta memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Archievable, Relevant dan Time Bond) maka ditetapkan Peraturan Bupati Toba Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Toba Nomor 74 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Toba dan Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026.

Sehubungan dengan terbitnya Perubahan tersebut maka IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba TW.II menjadi :

1. Pengentasan Desa Tertinggal
2. Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

c. Evaluasi IKS

1. Persentase Peningkatan Status Desa target 86,00% realisasi sampai dengan triwulan I 0 % dengan tingkat capaian kinerja 0,00%.
2. Persentase desa yang melaksanakan tertib administrasi target 90,00 % realisasi 0,19 % dengan tingkat capaian kinerja 0,21%.
3. Persentase LKD dan LAD aktif target 70,00% realisasi sampai dengan triwulan I 10,00% dengan tingkat capaian kinerja 14,29%.

4. Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak target 65,00% realisasi sampai dengan triwulan I 34,32% dengan tingkat capaian kinerja 52,80%.

d. Evaluasi Indikator Program

1. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD target 90,00 persen realiasi 8,44 persen dengan tingkat capaian kinerja 9,38%.
2. Persentase Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif target 100 persen realiasi 0 persen dengan tingkat capaian kinerja 0%.
3. Persentase ketersediaan data gender dan anak target 52,27 persen realiasi 0 persen dengan tingkat capaian kinerja 0%.
4. Persentase Kelurahan/Desa Layak Anak target 22,54 persen realiasi 5,64 persen dengan tingkat capaian kinerja 25,02%.
5. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten target 100 persen realiasi 17,86 persen dengan tingkat capaian kinerja 17,86%.
6. Persentase Desa Berkembang target 36,80 persen realiasi 0 persen dengan tingkat capaian kinerja 0%.
7. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa target 9,09 persen realiasi 0,05 persen dengan tingkat capaian kinerja 0,55%.
8. Persentase Desa Tertib Administrasi target 100 persen realiasi 43,29 persen dengan tingkat capaian kinerja 43,29%.
9. Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan MHA target 2,97 persen realiasi 0,93 persen dengan tingkat capaian kinerja 31,31%.

e. Hasil Evaluasi Realisasi Program/Kegiatan sampai Triwulan I

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

f. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target PD, antara lain karena:

a. Terlambatnya pengesahan anggaran.

b. Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan.
c. Kenaikan indek harga satuan barang.
d. Adanya kejadian luar biaya (misal, bencana alam dan bencana non alam).
e. Kombinasi diantara a, b, dan c atau faktor lainnya.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja untuk tahun berkenaan.

g. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program dan kegiatan adalah mendorong semua bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak agar segera melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan didalam APBD Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba. Tercapainya atau tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja (LK) Pemerintah. Perubahan Renja Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas PMDP dan PA selama tahun 2025. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD terlampir pada tabel Rekapitulasi Hasil Rancangan Renja PD dan evaluasi indikator kinerja daerah Kabupaten Toba.

Evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dapat dilihat dari tabel T-C 29 berikut :

Tabel T-C. 29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Toba

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*), Kegiatan (*Output*)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan sesuai Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinejra Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025						Perkirakan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025			
													Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6+8)		11 = (10/5)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																						
III.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																						
9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak																						
2	**08**	**02**	**6**			**Program Pengarusuttamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentasi ARG pada Belanja Langsung APBD**	**Persen**	**100,00**	**875.000.000,00**	**85,00**	**295.880.722,00**	**90,00**	**325.000.000,00**	**8,44**	**1.985.600,00**	**9,38%**	**0,61%**	**8,44**	**297.866.322,00**	**8,44%**	**34,04%**
2	08	02	2	01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG	orang	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	08	02	2	02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Dilatih Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	orang	400,00	500.000.000,00	4,00	100.000.000,00	80,00	125.000.000,00	15,00	1.652.600,00	18,75%	0,00%	19,00	101.652.600,00	4,75%	20,33%
2	08	02	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan perempuan dan Anak yang mendapat Bantuan Keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah	Lembaga	5,00	375.000.000,00	3,00	195.880.722,00	1,00	125.000.000,00	0,00	333.000,00	0,00%	0,27%	3,00	196.213.722,00	60,00%	52,32%
2	**08**	**03**				**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif**	**persen**	**100,00**	**1.575.000.000,00**	**0,04**	**422.832.600,00**	**100,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**422.832.600,00**	**0,00%**	**26,85%**
2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 10.000 penduduk perempuan)	persen	0,35	975.000.000,00	19,94	204.603.000,00	0,060	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,99	204.603.000,00	1136,18%	20,98%
2	08	03	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyediaan layanan Perlindungan hak Perempuan yang telah Standarisasi	lembaga	5,00	600.000.000,00	2,00	218.229.600,00	1,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00	218.229.600,00	40,00%	36,37%
2	**08**	**05**				**Program Pengelolaan Sistem Data gender dan Anak**	**Persentase Ketersediaan data gender dan anak**	**persen**	**100,00**	**350.000.000,00**	**0,39**	**74.237.500,00**	**52,27**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**74.237.500,00**	**0,00%**	**21,21%**
2	08	05	2	01		Pengumpulan, Penholahan Analisis dam Penyajian Data gender dan Anak dalam Kelembagaan Data ditingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan data, informasi gender dan anak di kabupaten	OPD	28,00	350.000.000,00	10,00	74.237.500,00	5,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,00	74.237.500,00	35,71%	21,21%
2	**08**	**06**				**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Persentase Kelurahan/Desa Layak Anak**	**persen**	**100,00**	**1.650.000.000,00**	**3,94**	**395.289.481,00**	**22,54**	**240.000.000,00**	**5,64**	**2.639.000,00**	**25,02%**	**1,10%**	**5,64**	**397.928.481,00**	**5,64%**	**24,12%**
2	08	06	2	01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah dan Dunia Usaha Data Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan layak anak	Desa/kel	244,00	1.225.000.000,00	101,00	320.289.481,00	49,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	101,00	320.289.481,00	41,39%	26,15%
2	08	06	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga layanan Anak	Lembaga	10,00	425.000.000,00	2,00	75.000.000,00	2,00	50.000.000,00	1,00	2.639.000,00	50,00%	5,28%	3,00	77.639.000,00	30,00%	18,27%
2	**08**	**07**				**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentasi Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi terkait Kabupaten**	**persen**	**100,00**	**550.000.000,00**	**100,00**	**280.993.128,00**	**100,00**	**100.000.000,00**	**17,86**	**47.886.000,00**	**17,86%**	**47,89%**	**17,86**	**328.879.128,00**	**17,86%**	**59,80%**
2	08	07	2	01		Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan Para Pihak Linkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Ditangani	orang	125,00	550.000.000,00	67,00	280.993.128,00	28,00	100.000.000,00	5,00	47.886.000,00	17,86%	47,89%	72,00	328.879.128,00	57,60%	59,80%
IV.Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																						
2	**13**	**02**	**0**	**00**	**00**	**Program Penataan Desa**	**Persen Desa Berkembang**	**persen**	**100,00**	**456.000.000,00**	**29,44**	**194.881.429,00**	**44,16**	**80.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**194.881.429,00**	**0,00%**	**42,74%**
2	13	02	2	01	00	Penyelenggaraan Penataan Desa	Tertatanya sarana dan prasarana desa	Desa	146,00	456.000.000,00	30,00	194.881.429,00	10,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	30,00	194.881.429,00	20,55%	42,74%

2	**13**	**03**	**0**	**00**	**00**	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Persentase peningkatan kerjasama desa**	**persen**	**41,00**	**225.000.000,00**	**20,07**	**114.270.456,00**	**9,00**	**40.000.000,00**	**0,05**	**15.613.000,00**	**0,56%**	**39,03%**	**0,12**	**129.883.456,00**	**0,30%**	**57,73%**
2	13	03	2	01	00	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Fasilitasi kerjasama antar desa	kerjasama	10,00	225.000.000,00	6,00	114.270.456,00	2,00	40.000.000,00	1,00	15.613.000,00	50,00%	39,03%	7,00	129.883.456,00	70,00%	57,73%
2	**13**	**04**	**0**	**00**	**00**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa tertib administrasi**	**persen**	**100,00**	**20.365.481.107,00**	**100,00**	**11.407.886.078,00**	**100,00**	**3.923.900.000,00**	**43,29**	**941.586.520,00**	**43,29%**	**24,00%**	**43,29**	**12.349.472.598,00**	**43,29%**	**60,64%**
2	13	04	2	01	00	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarasan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa	Desa	231,00	20.365.481.107,00	693,00	11.407.886.078,00	231,00	3.923.900.000,00	100,00	941.586.520,00	43,29%	24,00%	793,00	12.349.472.598,00	343,29%	60,64%
2	**13**	**05**	**0**	**00**	**00**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan MHA**	**persen**	**15,00**	**8.897.955.172,00**	**19,80**	**3.544.678.627,00**	**2,97**	**1.530.000.000,00**	**0,93**	**40.309.000,00**	**31,31%**	**2,63%**	**6,20**	**3.584.987.627,00**	**41,33%**	**40,29%**
2	13	05	2	01	00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah	Memfasilitasi, Meningkatkan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa serta masyarakat desa, lembaga adat desa serta masyarakat hukum adat	Lembaga	240,00	8.897.955.172,00	144,00	3.544.678.627,00	48,00	1.530.000.000,00	15,00	40.309.000,00	31,25%	2,63%	159,00	3.584.987.627,00	66,25%	40,29%
2	**13**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**	**persen**	**100,00**	**21.909.382.574,00**	**61,90**	**11.601.818.824,00**	**100,00**	**3.658.429.000,00**	**6,37**	**558.437.742,00**	**6,37%**	**15,26%**	**6,37**	**12.160.256.566,00**	**6,37%**	**55,50%**
2	13	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen	100,00	273.984.633,00	100,00	80.786.739,00	100,00	58.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20,00	80.786.739,00	20,00%	29,49%
2	13	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi	persen	100,00	15.534.905.491,00	100,00	9.462.487.116,00	100,00	2.692.929.000,00	12,50	426.113.873,00	12,50%	15,82%	22,50	9.888.600.989,00	22,50%	63,65%
2	13	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi kepegawaian	persen	100,00	286.984.420,00	0,00	15.000.000,00	97,67	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	15.000.000,00	0,00%	5,23%
2	13	01	2	06		Administrasi umum Pangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi umum	persen	100,00	2.534.109.535,00	100,00	778.535.804,00	100,00	246.000.000,00	16,67	50.335.522,00	16,67%	20,46%	23,33	828.871.326,00	23,33%	32,71%
2	13	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	persen	100,00	585.000.000,00	33,33	31.490.000,00	100,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,67	31.490.000,00	6,67%	5,38%
2	13	01	2	08		Penyedia Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	persen	100,00	1.558.564.691,00	50,00	696.847.395,00	100,00	259.000.000,00	10,42	34.425.140,00	10,42%	13,29%	12,08	731.272.535,00	12,08%	46,92%
2	13	01	2	09		Pemeliharaan barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara	persen	100,00	1.135.833.804,00	47,00	536.671.770,00	100,00	292.000.000,00	5,00	47.563.207,00	5,00%	16,29%	10,40	584.234.977,00	10,40%	51,44%
TOTAL										**56.853.818.853,00**				**10.032.329.000,00**		**1.608.456.862,00**	**13,38%**	**13,05%**		**29.941.225.707,00**	**12,32%**	**42,29%**

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba

Rencana Kerja adalah yang memuat program, kegiatan dan indikator kinerja. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut.

Program dan Kegiatan pemantapan ketahanan pangan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dibiayai Dana Alokasi Umum (DAU) Kebutuhan anggaran Dinas PMDP dan PA Tahun 2025 Rp.10.061.526.438.

Rencana tindak lanjut dari perencanaan ini dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, yang akan akhirnya di tuangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) TA 2025.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 diusulkan pendanaannya dari dana APBD. Untuk lebih rinci Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sesuai yang telah direncanakan dan hasil analisis kebutuhan serta telah di input kedalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun Anggaran 2025 direncanakan, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
        - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
        - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
        - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
        - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
        - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENATAAN DESA
    1. Penyelenggaraan Penataan Desa
        - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
3. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
    1. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
        - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
   - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
   - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
   - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
   - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
   1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
      - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
      - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
      - Fasilitasi Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
      - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
      - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

6. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
   1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

7. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
   1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
   1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA

3.2 Tujuan, Sasaran, IKU, IKK dan Program sesuai Renstra 2025-2029

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 dalam poin ke 2 (dua) di jelaskan bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025. Berikut ini tujuan, sasaran, IKU, IKK dan Program serta Targetnya tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Renstra Tahun 2025-2029:

1. Tujuan Renstra

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Kemandirian desa
2. Meningkatnya kesetaraan gender
3. Menurunnya Kekerasan terhadap Anak
4. Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan

Berikut Indikator dan target tujuan Tahun 2025 :

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Kemandirian desa	Indeks Desa Membangunan (IDM)	indeks	76,19
2.	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks (%)	0,39
3.	Menurunnya Kekerasan terhadap Anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	
4.	Menurunnya Kekerasan terhadap perempuan	Pesentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	

2. Sasaran Renstra

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Peningkatan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Desa
2. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak

Berikut indikator dan target sasaran Tahun 2025 :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1.	Peningkatan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Desa	Persentase Desa Mandiri	%	0,4
2.	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	77,62

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

No	Indikator	Satuan	Target
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	98,24
2.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,39
3.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	0
4.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	77,62
5.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	76,19
6.	Persentase Desa Mandiri	%	0,4

4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

No	Indikator	Satuan	Target
1.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	0,07

5. Program Tahun 2025

Sesuai Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 9 (Sembilan) program. Program Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah adalah:

No	Program	Indikator	Satuan	Target
1.	Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	60
2.	Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	40
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik	%	0
4.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	% %	0 30
5.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	0,07

No	Program	Indikator	Satuan	Target
6.	Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	0
7.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	0
8.	Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	indeks	0
9.	Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	indeks	0

3.2. PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025 menggunakan tabel T.C. 33.

Tabel TC. 33
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Toba
Tahun 2025

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**Kab. Toba**	**3.658.429.000**	**4.057.341.861**	**Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**Kab. Toba**	**4.057.341.861**	**-**
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**Terlaksananya kinerja perangkat daerah**	**100%**	**Kab. Toba**	**58.500.000**	**47.397.181**	**Terlaksananya kinerja perangkat daerah**	**100%**	**Kab. Toba**	**47.397.181**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	Kab. Toba	46.000.000	35.070.813	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	Kab. Toba	35.070.813	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Laporan	Kab. Toba	12.500.000	12.326.368	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Laporan	Kab. Toba	12.326.368	-
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Terlaksananya layanan administrasi**	**100%**	**Kab. Toba**	**2.692.929.000**	**3.178.172.994**	**Terlaksananya layanan administrasi**	**100%**	**Kab. Toba**	**3.178.172.994**	**-**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	Kab. Toba	2.680.429.000	3.168.860.264	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	Kab. Toba	3.168.860.264	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10 Laporan	Kab. Toba	12.500.000	9.312.730	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10 Laporan	Kab. Toba	9.312.730	-
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian**	**93,02%**	**Kab. Toba**	**65.000.000**	**-**	**Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian**	**93,02%**	**Kab. Toba**	**-**	**-**
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	2 unit	Kab. Toba	15.000.000	-	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	2 unit	Kab. Toba	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	15 paket	Kab. Toba	-	-	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	15 paket	Kab. Toba	-	-
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	Kab. Toba	50.000.000	-	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	Kab. Toba	-	-
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**Terlaksananya layanan administrasi umum**	**100%**	**Kab. Toba**	**246.000.000**	**268.076.206**	**Terlaksananya layanan administrasi umum**	**100%**	**Kab. Toba**	**268.076.206**	**-**
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	6.000.000	8.045.280	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	8.045.280	-

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	50.000.000	27.996.850	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	27.996.850	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	15.000.000	19.719.705	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	19.719.705	-
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	40.000.000	22.709.371	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	Kab. Toba	22.709.371	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	Kab. Toba	15.000.000	19.875.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	Kab. Toba	19.875.000	-
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	Kab. Toba	120.000.000	169.730.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	Kab. Toba	169.730.000	-
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur**	**100%**	**Kab. Toba**	**45.000.000**	**-**	**Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur**	**100%**	**Kab. Toba**	**-**	**-**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		Kab. Toba	-	-	Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		Kab. Toba	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	Kab. Toba	15.000.000	14.462.190	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	Kab. Toba	14.462.190	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	Kab. Toba	15.000.000	-	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	Kab. Toba	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit	Kab. Toba	15.000.000	-	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit		-	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Terlaksananya Penunjang Kinerja Aparatur**	**100%**	**Kab. Toba**	**259.000.000**	**287.400.000**	**Terlaksananya Penunjang Kinerja Aparatur**	**100%**	**Kab. Toba**	**287.400.000**	**-**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporang Penyediaan Jasa surat menyurat		Kab. Toba	-	-	Jumlah Laporang Penyediaan Jasa surat menyurat		Kab. Toba	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Kab. Toba	24.000.000	24.000.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Kab. Toba	24.000.000	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 laporan	Kab. Toba	6.000.000	-	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 laporan	Kab. Toba	-	-

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8 laporan	Kab. Toba	229.000.000	263.400.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8 laporan	Kab. Toba	263.400.000	-
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Terpeliharanya barang milik daerah**	**100%**	**Kab. Toba**	**292.000.000**	**276.295.480**	**Terpeliharanya barang milik daerah**	**100%**	**Kab. Toba**	**276.295.480**	**-**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	Kab. Toba	170.000.000	236.967.000	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	Kab. Toba	236.967.000	-
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	Kab. Toba	25.000.000	-	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	Kab. Toba	-	-
Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	Kab. Toba	45.000.000	14.200.000	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	Kab. Toba	14.200.000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	Kab. Toba	35.000.000	25.128.480	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	Kab. Toba	25.128.480	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	Kab. Toba	17.000.000	-	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	Kab. Toba	-	-
PROGRAM PENATAAN DESA	**Persentase Desa Berkembang**	**44,16%**	**Kab. Toba**	**80.000.000**	**44.597.658**	**Persentase Desa Berkembang**	**44,16%**	**Kab. Toba**	**44.597.658**	**0**
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	**Tertatanya sarana dan prasarana desa**	**10 desa**	**Kab. Toba**	**80.000.000**	**44.597.658**	**Tertatanya sarana dan prasarana desa**	**10 desa**	**Kab. Toba**	**44.597.658**	**0**
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya	30 desa	Kab. Toba	50.000.000	-	jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya	30 desa	Kab. Toba	-	-
Fasilitasi Sarana dan prasarana desa	Jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi	2 unit	Kab. Toba	30.000.000	44.597.658	Jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi	2 unit	Kab. Toba	44.597.658	-
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Persentase peningkatan kerjasama Desa**	**0,09%**	**Kab. Toba**	**40.000.000**	**382.999.856**	**Persentase peningkatan kerjasama Desa**	**0,09%**	**Kab. Toba**	**382.999.856**	**0**
KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA	**Fasilitasi kerjasama antar desa**	**2 kerjasama**	**Kab. Toba**	**40.000.000**	**382.999.856**	**Fasilitasi kerjasama antar desa**	**2 kerjasama**	**Kab. Toba**	**382.999.856**	**0**
Fasilitasi kerjasama antar desa dalam Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	2 dokumen	Kab. Toba	40.000.000	382.999.856	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	2 dokumen	Kab. Toba	382.999.856	-
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	**Persentase desa tertib administrasi**	**100%**	**Kab. Toba**	**3.923.900.000**	**3.964.737.687**	**Persentase desa tertib administrasi**	**100%**	**Kab. Toba**	**3.964.737.687**	**-**
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa**	**231 desa**	**Kab. Toba**	**3.923.900.000**	**3.964.737.687**	**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa**	**231 desa**	**Kab. Toba**	**3.964.737.687**	**-**

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	30 dokumen	Kab. Toba	150.000.000	-	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	30 dokumen	Kab. Toba	-	-
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	3 dokumen	Kab. Toba	106.000.000	110.551.950	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	3 dokumen	Kab. Toba	110.551.950	-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	231 dokumen	Kab. Toba	3.155.000.000	3.467.999.756	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	231 dokumen	Kab. Toba	3.467.999.756	-
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	231 orang	Kab. Toba	59.000.000	-	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	231 orang	Kab. Toba	-	-
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	20 dokumen	Kab. Toba	120.000.000	200.000.000	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	20 dokumen	Kab. Toba	200.000.000	-
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	1 laporan	Kab. Toba	120.000.000	-	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	1 laporan		-	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	231 dokumen	Kab. Toba	28.900.000	-	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	231 dokumen	Kab. Toba	-	-
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	2 dokumen	Kab. Toba	50.000.000	-	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	2 dokumen	Kab. Toba	-	-
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	231 orang	Kab. Toba	40.000.000	78.687.663	Jumlah anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	231 orang	Kab. Toba	78.687.663	-
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa	10 desa	Kab. Toba	40.000.000	-	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa	10 desa	Kab. Toba	-	-
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 dokumen	Kab. Toba	55.000.000	107.498.318	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 dokumen	Kab. Toba	107.498.318	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan MHA**	**2,97%**	**Kab. Toba**	**1.530.000.000**	**1.230.000.000**	**Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan MHA**	**2,97%**	**Kab. Toba**	**1.230.000.000**	**-**

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DIBIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KAB/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KAB/KOTA	**Memfasilitasi, meningkatkan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa serta masyarakat hukum adat**	**48 lembaga**	**Kab. Toba**	**1.530.000.000**	**1.230.000.000**	**Memfasilitasi, meningkatkan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa serta masyarakat hukum adat**	**48 lembaga**	**Kab. Toba**	**1.230.000.000**	**-**
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	1 dokumen	Kab. Toba	40.000.000	-	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	1 dokumen	Kab. Toba	-	-
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	1 dokumen	Kab. Toba	50.000.000	189.527.800	Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	1 dokumen	Kab. Toba	189.527.800	-
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	215 lembaga	Kab. Toba	50.000.000	95.471.531	Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	215 lembaga	Kab. Toba	95.471.531	-
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	1 unit	Kab. Toba	60.000.000	-	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	1 unit	Kab. Toba	-	-
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	12 dokumen	Kab. Toba	100.000.000	45.000.000	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	12 dokumen	Kab. Toba	45.000.000	-
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	2 laporan	Kab. Toba	80.000.000	50.000.000	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	2 laporan	Kab. Toba	50.000.000	-

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	Kab. Toba	150.000.000	150.000.669	Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	Kab. Toba	150.000.669	-
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 dokumen	Kab. Toba	1.000.000.000	700.000.000	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 dokumen	Kab. Toba	700.000.000	-
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**	**90%**	**Kab. Toba**	**325.000.000**	**250.000.000**	**Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**	**90%**	**Kab. Toba**	**250.000.000**	**0**
KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA			**Kab. Toba**	**75.000.000**						
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Teknis Penyelenggaraan PUG di Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kebijakan	Kab. Toba	75.000.000		Jumlah Kebijakan Teknis Penyelenggaraan PUG di Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kebijakan			
KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	**Jumlah Orang yang dilatih Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi**	**80 orang**	**Kab. Toba**	**125.000.000**	**125.000.000**	**Jumlah Orang yang dilatih Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi**	**80 orang**	**Kab. Toba**	**125.000.000**	**0**
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	Kab. Toba	125.000.000	125.000.000	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	Kab. Toba	125.000.000	-
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	**Jumlah Lembaga layanan perempuan dan anak yang mendapat bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah**	**1 lembaga**	**Kab. Toba**	**125.000.000**	**125.000.000**	**Jumlah Lembaga layanan perempuan dan anak yang mendapat bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah daerah**	**1 lembaga**	**Kab. Toba**	**125.000.000**	**0**
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 dokumen	Kab. Toba	125.000.000	125.000.000	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 dokumen	Kab. Toba	125.000.000	-

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif"**	**100%**	**Kab. Toba**	**100.000.000**	**-**	**Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif"**	**100%**	**Kab. Toba**	**-**	**-**
KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 10.000 penduduk perempuan)**	**0,060%**	**Kab. Toba**	**50.000.000**	**-**	**Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 10.000 penduduk perempuan)**	**0,060%**	**Kab. Toba**	**-**	**0**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	50.000.000	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	-	-
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi**	**1 lembaga**	**Kab. Toba**	**50.000.000**	**-**	**Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi**	**1 lembaga**	**Kab. Toba**	**-**	**-**
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	50.000.000	-	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Persentase ketersediaan data gender dan anak**	**52,27%**	**Kab. Toba**	**35.000.000**	**-**	**Persentase ketersediaan data gender dan anak**	**52,27%**	**Kab. Toba**	**-**	**-**
KEGIATAN PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Ketersediaan data,informasi gender dan anak di kabupaten**	**5 OPD**	**Kab. Toba**	**35.000.000**	**-**	**Ketersediaan data,informasi gender dan anak di kabupaten**	**5 OPD**	**Kab. Toba**	**-**	**-**
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	Kab. Toba	35.000.000	-	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	Kab. Toba	-	-
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak**	**22,54%**	**Kab. Toba**	**240.000.000**	**179.345.000**	**Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak**	**22,54%**	**Kab. Toba**	**179.345.000**	**0**
KEGIATAN PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	**Jumlah Desa/Kelurahan layak anak**	**49 desa/kel**	**Kab. Toba**	**190.000.000**	**-**	**Jumlah Desa/Kelurahan layak anak**	**49 desa/kel**	**Kab. Toba**	**-**	**0**

Urusan, Program, Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/ berkurang
	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Renja	DPA	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Data Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 organisasi	Kab. Toba	140.000.000	-	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 organisasi	Kab. Toba	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	50.000.000	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	-	-
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	**Jumlah lembaga layanan anak**	**2 lembaga**	**Kab. Toba**	**50.000.000**	**179.345.000**	**Jumlah lembaga layanan anak**	**2 lembaga**	**Kab. Toba**	**179.345.000**	**0**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	50.000.000	179.345.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	179.345.000	-
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**	**100%**	**Kab. Toba**	**100.000.000**	**377.655.000**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**	**100%**	**Kab. Toba**	**377.655.000**	**0**
KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Jumlah anak yang ditangani**	**28 orang**	**Kab. Toba**	**100.000.000**	**377.655.000**	**Jumlah anak yang ditangani**	**28 orang**	**Kab. Toba**	**377.655.000**	**0**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	100.000.000	377.655.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Toba	377.655.000	-
J U M L A H				**10.032.329.000**	**10.486.677.062**				**10.486.677.062**	**-**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TOBA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							10.352.329.000,00	10.486.877.062,00	11.139.601.534,00	1.107.272.534,00							12.533.623.869,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.352.329.000,00	10.486.877.062,00	11.139.601.534,00	1.107.272.534,00							12.533.525.869,00	
	2.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							509.000.000,00	501.000.000,00	773.739.171,90	-28.260.828,10							1.457.866.000,00	
1	2.06.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD				90 Persen	90 Persen	325.000.000,00	250.000.000,00	167.373.870,54	-70.000.000,00							255.000.000,00	
	2.06.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Orang		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.06.02.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/kota				1 Kebijakan	1 Kebijakan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.06.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang dibidik Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi*				60 orang	60 orang	125.000.000,00	125.000.000,00	81.783.100,00	-43.216.900,00			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Orang		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.06.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	81.783.100,00	-43.216.900,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.06.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga layanan perempuan dan anak yang mendapat bantuan keuangan/fasilitasi oleh pemerintah daerah*				1 lembaga	1 lembaga	125.000.000,00	125.000.000,00	85.590.570,54	-39.409.429,46			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Lembaga Layanan perempuan dan anak		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.06.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	85.590.570,54	-39.409.429,46	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2.06.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	"Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif"				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00							275.000.000,00	
	2.06.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (termasuk TPPO (per 10.000 penduduk perempuan)*				3.060 persen	3.060 persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Perempuan		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.06.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.06.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi*				1 lembaga	1 lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Lembaga		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.06.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	2.06.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persen ketersediaan data gender dan anak				52,27 Persen	52,27 Persen	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00							70.000.000,00	
	2.06.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kewenangan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Ketersediaan data informasi gender dan anak di kabupaten*				5 OPD	5 OPD	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Gender dan Anak		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.06.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	**2.06.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kelurahan / Desa layak anak**				**22,54 Persen**	**22,54 Persen**	**240.000.000,00**	**179.345.000,00**	**148.501.377,75**	**120.000.000,00**							**360.000.000,00**	
	2.06.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa/Kelurahan layak anak*				49 Desa/Kel	49 Desa/Kel	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Desa/Kelurahan		265.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.06.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Menerima Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				5 Organisasi	5 Organisasi	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			192.418.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.06.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			72.581.150,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.06.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga layanan anak*				2 lembaga	2 lembaga	50.000.000,00	179.345.000,00	148.501.377,75	98.501.377,75			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Lembaga		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.06.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	179.345.000,00	148.501.377,75	98.501.377,75	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	**2.06.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**				**100 Persen**	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**377.855.000,00**	**457.854.123,60**	**357.854.123,60**							**497.855.000,00**	
	2.06.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah anak yang ditangani*				28 orang	28 orang	100.000.000,00	377.855.000,00	457.854.123,60	357.854.123,60			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Anak		497.855.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.06.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA						0,0	0,00	377.855.000,00	457.854.123,60	457.854.123,60		DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			377.855.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																	
	2.06.07.2.01.0006	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**9.232.525.000,00**	**9.679.677.082,00**	**10.385.882.582,10**	**1.153.633.382,10**							**11.379.108.566,00**	
1	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.858.429.000,00**	**4.067.341.881,00**	**4.245.929.091,40**	**1.576.384.913,00**							**5.236.793.913,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja perangkat daerah*				100 persen	100 persen	58.500.000,00	47.997.191,00	45.044.026,70	-13.455.973,30			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kinerja Perangkat Daerah		96.175.133,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	48.000.000,00	35.070.813,00	28.287.569,10	-17.712.430,90	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			67.623.623,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	13 Laporan	12.500.000,00	12.326.388,00	16.756.457,60	4.256.457,60	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			29.551.610,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan layanan administrasi*				100 persen	100 persen	2.692.929.000,00	3.178.172.394,00	3.284.145.175,00	591.216.175,00			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	administrasi Keuangan		3.579.287.937,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2 680 429 000,00	3 168 860 264,00	3 268 860 264,00	588 431 264,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3 561 018 584,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				13 Laporan	13 Laporan	12 600 000,00	9 812 733,00	15 284 911,00	2 784 911,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			19 269 253,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian				97,67 persen	97,67 persen	85 000 000,00	0,00	0,00	-85 000 000,00			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	administrasi kepegawaian		50 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Pegawai				2 Unit	2 Unit	15 000 000,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			15 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	50 000 000,00	0,00	0,00	-50 000 000,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum				100 persen	100 persen	246 000 000,00	298 076 206,00	353 044 409,73	107 044 409,73			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	administrasi umum		802 979 587,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6 000 000,00	8 945 280,00	8 945 280,00	2 945 280,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			19 788 125,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50 000 000,00	27 996 950,00	44 527 864,00	-5 472 136,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			197 651 718,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15 000 000,00	19 719 735,00	19 719 735,00	4 719 735,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			64 699 113,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	43 000 000,00	32 739 371,00	20 896 559,70	-19 103 440,30	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			77 535 631,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4 Dokumen	15 000 000,00	19 875 000,00	19 875 000,00	4 875 000,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			39 940 625,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	120 000 000,00	169 730 000,00	239 980 000,00	119 980 000,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			412 364 375,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan perawatan dan penyediaan pendukung kinerja aparatur				100 Persen	100 Persen	45 000 000,00	0,00	0,00	-45 000 000,00			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	perawatan dan penyediaan pendukung kinerja aparatur		75 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	15 000 000,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			25 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.97.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.97.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.98	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur				100 persen	100 persen	259.000.000,00	287.400.000,00	287.400.000,00	28.400.000,00			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kinerja Aparatur		355.761.709,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.98.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.355.459,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.98.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			6.788.125,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.98.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	229.000.000,00	263.400.000,00	263.400.000,00	34.400.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			313.818.125,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.99	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Dipelihara				100 persen	100 persen	292.000.000,00	276.295.480,00	276.295.480,00	-15.704.520,00			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Barang Milik Daerah		296.589.647,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.99.0001	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	170.000.000,00	236.947.000,00	236.947.000,00	66.947.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			190.336.572,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.99.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			6.788.125,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.99.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	45.000.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	-30.800.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			16.788.125,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.99.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	25.128.480,00	25.128.480,00	-9.871.520,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.99.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			22.776.825,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persen Desa Berkembang**				**36,50 Persen**	**36,50 Persen**	**50.000.000,00**	**44.597.858,00**	**41.168.860,60**	**0,00**							**50.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyenggaraan Penataan Desa	Terfasilitasi sarana dan prasarana desa				10 Desa	10 Desa	50.000.000,00	44.597.858,00	41.168.860,60	-38.831.139,40			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Desa		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				30 Desa	30 Desa	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				2 Unit	2 Unit	30 000 000,00	44 597 658,00	41 168 850,80	11 168 850,80	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			30 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase peningkatan Kerjasama Desa**				**9,09 Persen**	**9,09 Persen**	**40.000.000,00**	**382.999.956,00**	**281.296.396,20**	**0,00**							**40.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Fasilitasi kerjasama antar desa*				2 kerjasama	2 kerjasama	40 000 000,00	382 999 956,00	261 296 396,20	221 296 396,20			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Desa		40 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	40 000 000,00	382 999 956,00	261 296 396,20	221 296 396,20	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa tertib administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.923.900.000,00**	**3.964.737.687,00**	**4.573.214.350,90**	**223.196.221,00**							**4.147.096.221,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa*				231 desa	231 desa	3 923 900 000,00	3 964 737 687,00	4 573 214 350,90	649 314 350,90			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Desa		4 147 096 221,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				33 Dokumen	33 Dokumen	150 000 000,00	0,00	0,00	-150 000 000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			300 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	106 000 000,00	110 551 950,00	132 938 365,00	26 938 365,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			136 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				231 Dokumen	231 Dokumen	3 155 000 000,00	3 467 999 756,00	3 837 869 349,20	682 869 349,20	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3 257 096 221,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0005	Pemantauan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				231 Orang	231 Orang	59 000 000,00	0,00	0,00	-59 000 000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			139 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0006	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				29 Dokumen	29 Dokumen	120 000 000,00	200 000 000,00	267 685 400,00	147 685 400,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	120 000 000,00	0,00	0,00	-120 000 000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang terbaruin				231 Dokumen	231 Dokumen	28 900 000,00	0,00	0,00	-28 900 000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			28 900 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	50 000 000,00	0,00	0,00	-50 000 000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				231 Orang	231 Orang	40 000 000,00	78 687 663,00	261 891 014,10	221 891 014,10	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Desa yang Difasilitasi Dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				10 Desa	10 Desa	40 000 000,00	0,00	0,00	-40 000 000,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	55 000 000,00	107 496 318,00	73 950 222,60	18 950 222,60	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			56 100 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan MHA**				**2,97 Persen**	**2,97 Persen**	**1.530.000.000,00**	**1.230.000.000,00**	**1.244.251.863,00**	**342.278.732,00**							**1.872.278.732,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Berperan di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Peradilannya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatkan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa serta masyarakat hukum adat*				48 lembaga	48 lembaga	1 530 000 000,00	1 230 000 000,00	1 244 251 863,00	-285 748 137,00			-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa serta masyarakat hukum adat		1 872 278 732,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	40 000 000,00	0,00	0,00	-40 000 000,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	50 000 000,00	189 527 800,00	308 971 109,00	258 971 109,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				215 Lembaga	215 Lembaga	50 000 000,00	95 471 531,00	63 384 569,00	13 384 569,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Unit	1 Unit	50 000 000,00	0,00	0,00	-50 000 000,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	100 000 000,00	45 900 000,00	97 216 000,00	-62 784 000,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			140 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	2 Laporan	80 000 000,00	50 000 000,00	54 959 000,00	-25 041 000,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			182 278 732,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	150 000 000,00	150 000 669,00	118 454 536,00	-31 545 465,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				3 Dokumen	3 Dokumen	1 000 000 000,00	700 000 000,00	861 266 450,00	-338 733 550,00	Kab Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1 000 000 000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		JUMLAH							**10.532.329.000,00**	**10.456.677.062,00**	**11.139.801.534,00**	**-194.932.324.891,00**							**12.853.823.888,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Tahun 2025 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pedoman bagi para pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas PMDP dan PA dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Toba.

Disamping itu Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat mengatur arah perkembangannya dalam pencapaian hasil yang diharapkan selain dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berkenaan.

Untuk itu kami mengharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk sungguh-sungguh melaksanakan Rencana Kerja ini, sehingga dapat tercapai upaya yang maksimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba.

Balige, 2025

Plt. KEPALA DINAS PMDP DAN PA
KABUPATEN TOBA,

MELATI SILALAHI, SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19740313 199402 2 002